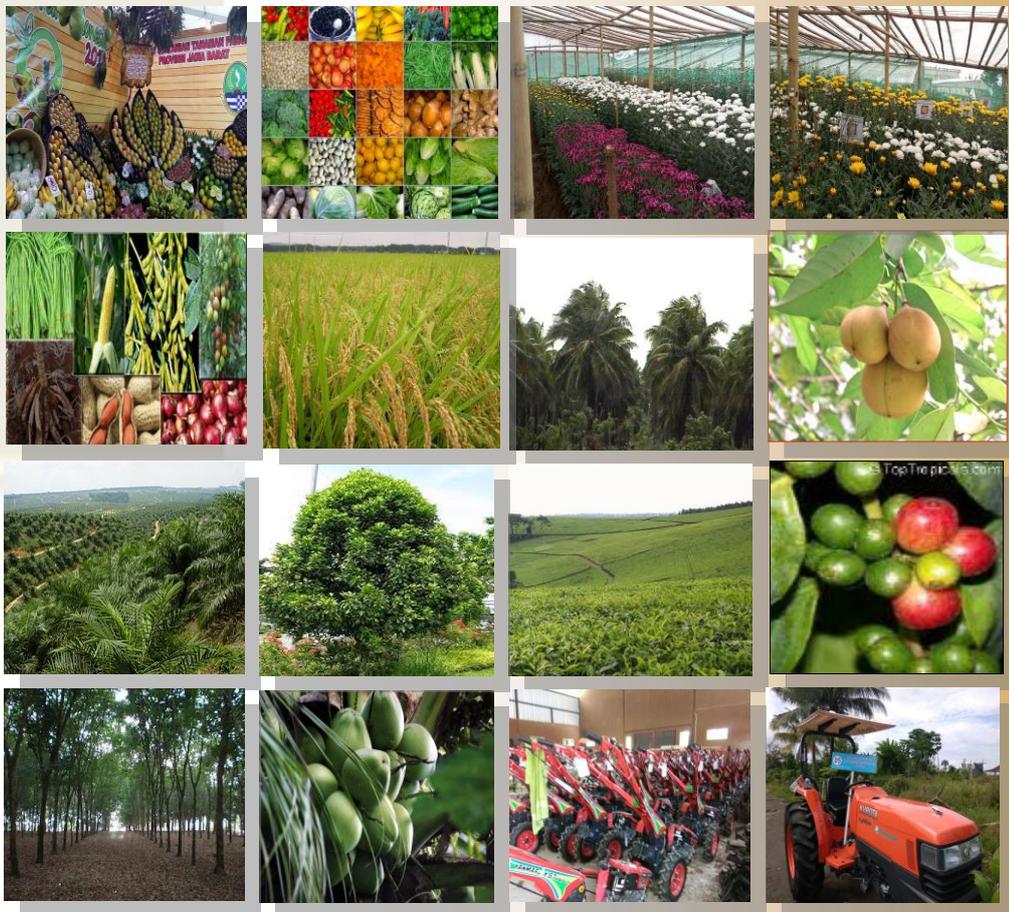


RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PERTANIAN**

**Komplek Perkantoran Cimaja Jl Raya Cisolok Km 10
Telp (0266) 436407-436408 Cisolok Palabuhanratu-Sukabumi**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2017.

Renja ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi 2016-2021, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Sukabumi.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2017, dapat disusun dan menjadi pedoman serta acuan bagi pelaksanaan Pembangunan Pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2017.

Sukabumi, Januari 2017

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,



Ir. Hj. DEDAH HERLINA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630711 198809 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	5
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan ungsi Dinas Pertanian	7
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian	13
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian	13
BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi Pembangunan	15
4.2. Misi	18
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	22
BAB V PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2017 dan Rencana Kerja Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat Tahun 2017 dan Rencana kerja Kementerian Pertanian Tahun 2017.

Penyusunan Rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi periode 2016 – 2021.

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani dan kebun, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perkebunan. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi non pertanian dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 adaah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016– 2021.
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 mencakup Kebijakan, Program beserta indikator kinerjanya dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, beserta pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 adalah :

- a. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi yang memuat arah kebijakan teknis dan kegiatan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sukabumi.
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2017.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Renstra Dinas dengan Renja Tahun 2017, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian selama 1 (Satu) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian tahun 2017 yaitu tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan selama 1 (Satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 disusun sesuai Permendagri no 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. LatarBelakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi PD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun 2016 dan Capaian Renstra
Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

BELANJA

Belanja yang bersumber dari APBD TA. 2016

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	40.440.000,-	54.500.000,-	134,77
2	Belanja Tidak Langsung	5.5213.442.112,-	5.120.848.986,-	98,72
3	Belanja langsung	36.268.807.579,-	34.843.357.026,-	98,79
Jumlah Belanja		41.522.689.691,-	40.018.706.012,-	96,38

Evaluasi kegiatan tahun 2016

Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	792.780.125,-	782.788.263,-	98,74
Pelayanan Administrasi Perkantoran	550.757.125,-	540.765.263,-	98,19
Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis	150.003.000,-	150.003.000,-	100,00
Pelayanan Administrasi Asset	59.010.000,-	59.010.000,-	100,00
Pelayanan Administrasi Kepegawaian	33.010.000,-	33.010.000,-	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	707.230.000,-	699.127.850,-	98,85
Pengadaan Perangkat Komputer	79.550.000,-	78.310.050,-	98,44
Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	32.550.000,-	32.550.000,-	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	101.980.000,-	101.830.000,-	99,85
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	275.000.000,-	268.623.800,-	97,68
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	29.000.000,-	29.000.000,-	100,00
Pembangunan Pagar kantor	189.150.000,-	188.814.000,-	99,82
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	89.830.000,-	89.830.000,-	100,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	89.830.000,-	89.830.000,-	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,-	25.000.000,-	100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	25.000.000,-	25.000.000,-	100,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	29.595.097.329,-	29.215.845.862	98,72
Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan	1.517.241.350,-	1.498.946.000	98,79
Pengembangan Infrastruktur pertanian, Peternakan, Perkebunan dan penyuluhan Dana Alokasi Khusus (DAK) non DR	14.362.257.000,-	14.113.244.712	98,27
Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Padi, Palawija dan Hortikultura	90.000.000,-	90.000.000,-	100,00
Prasarana dan Sarana Pertanian	13.552.185.000,-	13.446.707.150	99,22
Pengembangan Infrastruktur Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan Dana Alokasi Khusus SILPA DAK Reguler tahun 2015	73.413.579,-	66.948.000,-	91,19
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	689.230.000,-	685.918.300,-	99,52
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	185.000.000,-	184.476.300,-	99,72
Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian	423.230.000,-	420.442.000,-	99,34
Pengembangan Usaha dan Permodalan	81.000.000,-	81.000.000,-	100,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian	3.369.640.125,-	3.344.846.751,-	99,26
Optimalisasi kebun Dinas	403.500.000,-	400.447.500,-	99,24
Pengamanan Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura	200.720.000,-	200.470.000,-	99,88
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija	441.562.250,-	441.465.000,-	99,98
Peningkatan Produksi melalui Penyediaan benih Unggul dan Pupuk	1.052.000.000,-	1.039.478.250,-	98,81
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian	605.000.000,-	603.451.000,-	99,74
Perencanaan Pembangunan Pertanian	286.857.875,-	283.520.933,-	98,84
WISMP II (Dampingan)	300.000.000,-	296.014.068,-	98,67
WISMP (Hibah/Loan)	80.000.000,-	80.000.000,-	100,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategik Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian dan sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian kinerja masing-masing sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 dikategorikan “tercapai”, dikarenakan capaian kinerja berdasarkan perbandingan target penetapan kinerja dibandingkan realisasi sebesar sama dengan dan lebih besar dari 100%. Pencapaian sasaran dalam tahun 2016 secara umum telah dapat dicapai secara optimal. Secara rinci pencapaian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terciptanya Kesempatan Kerja Sektor Agribisnis

Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian	Orang	200	300	150

2. Meningkatnya Produksi Pangan

Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian :				
1. Padi	Ton	885.882	963.925	108,81
2. Jagung	Ton	35.000	96.157	274,73
3. Kedele	Ton	5.000	6.480	129,60
4. Ubi Kayu	Ton	150.000	130.860	87,24
5. Cabe	Ton	27.450	23.387	85,20
6. Tomat	Ton	24.630	19.749	80,18
7. Bawang Merah	Ton	403	908	225,31
8. Optimasi Lahan	Ton	500	540	108,00
9. Cetak lahan sawah/Perluasan Areal Sawah	Ha	50	22,9	46,00
10. Pengembangan Infrastruktur Pertanian	Ha	4.000	5.000	125,00
11. Alat Panen dan Pasca Panen	Unit	117	117	100,00
12. ALSINTAN PERTANIAN	Unit	420	481	114,52

3. Terwujudnya Sentra produksi Pertanian

Indikator	Satuan	Rencana	Realisasi	%
Berkembangnya Sentra Komoditas Hortikultura :				
Cabe	Desa	44	45	102,27
Bawang Merah	Desa	10	10	100,00
Manggis	Desa	17	20	117,65
Pepaya	Desa	17	20	117,65
Pisang	Desa	14	15	107,14
Jambu Kristal	Desa	7	8	114,29
Bunga dan Daun Potong	Desa	16	12	75,00
Biofarmaka	Desa	8	10	125,00
Produk olahan hasil pertanian	Jenis	2	2	
Padi	%	1	2	200,00
Palawija	%	2	4	200,00
Hortikultura	%	2	5	250,00
Pemasaran dan promosi hasil Pertanian	Kali	5	15	300,00

Keberhasilan pelaksanaan sasaran Renstra, tidak terlepas dari dukungan dana, ketersediaan aparat teknis dan non teknis, serta sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut lebih banyak disebabkan karena lemahnya koordinasi dan pemahanan yang berbeda pada berbagai tingkatan. Faktor alam (non teknis) sangat berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura serta terhadap target peningkatan indeks pertanaman.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian

Pembangunan di dalam pelaksanaannya akan menemui permasalahan – permasalahan antara lain :

a. Gejala penyempitan dan penguasaan lahan

Kebutuhan pangan dari tahun ke tahun akan terus meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi disisi lain penguasaan petani umumnya sampai dengan saat ini semakin sempit yaitu kurang dari 0,5 Ha, hal ini akan menyebabkan kurang sejahteranya petani yang mungkin akan terjadi kemiskinan struktural.

b. Proses pasca panen

Umumnya hasil produksi (bahan baku pangan) tidak diperhatikan, padahal apabila diperhatikan akan memberikan nilai tambah. Proses pasca panen merupakan rantai lanjutan kegiatan pemasaran produk yang harus didukung sarana prasarana atau infrastruktur.

c. Pelaksanaan otonomi daerah

Otonomi daerah sebagai salah satu ikhtisar untuk mempercepat pemerataan pembangunan karena didesentralisasikan kewenangannya kepada daerah tetapi nampaknya daerah kurang memperhatikan yaitu dipisahkan kewenangan bahkan dihilangkan tugas, pokok dan fungsinya selain itu juga kurangnya dukungan anggaran.

d. Fasilitas permodalan

Selain kesulitan memperluas lahan dan peningkatan penggunaan teknologi juga mengakses permodalan. Seperti sektor bisnis yang lain selayaknyalah sektor pertanian mendapatkan fasilitas pembiayaan yang memadai dengan proses yang cepat dan mudah.

e. Perubahan iklim global dan lingkungan hidup

Perubahan iklim global dan perubahan kondisi lingkungan hidup menyebabkan El-Nino yaitu menyebabkan terjadinya kemarau yang panjang sehingga produksi pertanian turun, bahkan mungkin kebakaran atau puso. Selain El-Nino, mungkin juga La-Nina yaitu menyebabkan terjadinya banjir. Perubahan dari El-Nino ke La-Nina akan menyebabkan perkembangbiakan hama penyakit tanaman.

f. Jumlah penduduk dan proporsi jumlah penduduk

Penduduk jumlahnya akan terus meningkat sejalan dengan turunnya tingkat kematian bayi dan penduduk usia lanjut, hal ini konsekwensinya akan terjadi perubahan jumlah konsumsi hasil pertanian akan meningkat pula.

Proporsi jumlah penduduk berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas akan meningkat sejalan dengan itu proporsi tenaga kerja yang terlibat akan bertambah juga, yang akhirnya tingkat pendapatan bertambah naik maka akan cenderung membeli produk yang mempunyai nilai utilitas lebih tinggi (cita rasa, segi bentuk, gizi, keamanan, ukuran, keindahan, kemudahan penggunaan dan tahan simpan).

g. Globalisasi ekonomi

Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang menimbulkan krisis ekonomi secara luas, ini menunjukkan basisnya jangan bertumpu pada sektor manufaktur tapi sektor pertanian, ternyata pada krisis ini paling resisten terhadap gejolak ekonomi, untuk itu hendaknya sektor pertanian harus sebagai sektor primadona dan bukan sektor penunjang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi wajib menerapkan prinsip– prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program – program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (budget intervention), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogram, dapat dimanfaatkan antara lain : forum musyawarah koordinasi perencanaan seperti : MUSRENBANGPUS di tingkat Pusat, MUSRENBANGPROP di tingkat Propinsi, MUSRENBANGDA di tingkat Kabupaten/Kota, MUSRENBANG Kecamatan, MUSRENBANG tingkat Desa dan MUSRENBANGNAS di tingkat Daerah, forum – forum lintas pelaku, dan konsultasi publik.

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas – luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang – undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia

usaha, dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program – program pembangunan yang berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program – program pembangunan;

Dalam membuat Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum – forum konsultasi, dengar pendapat publik (*public hearing*), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing – masing; Pada akhir tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan – peraturan lainnya;

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dengan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil – hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam membangun pertanian di kabupaten Sukabumi harus terus ditingkatkan. Melalui MUSRENBANG Tingkat Kecamatan diperoleh usulan-usulan dari masyarakat yang dikoordinir oleh BAPPEDA. Dengan kondisi seperti ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2016 dapat selaras dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Penyelarasan ini juga diarahkan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian di tingkat propinsi dan Pusat.

Berdasarkan Data hasil Usulan Masyarakat untuk Program dan Kegiatan di Dinas Pertanian. Kegiatan – kegiatan yang diusulkan mengarah pada 3 program yaitu Program Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Produksi Pertanian dengan gambaran sebagai berikut :

- a. Prioritas Kegiatan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah
- Peningkatan Produksi Padi
 - Optimalisasi Balai Benih Induk Padi sawah
 - Peningkatan Produksi melalui Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Optimalisasi Kebun Dinas
 - WISMP II
 - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Kemitraan Usaha melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - DAK Reguler Bidang Pertanian (DAK Reguler 2017)
 - DAK Reguler Bidang Pertanian (Pendamping)
 - WISMP (Loan)
- b. Prioritas Kegiatan pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani adalah :
- Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olahan Padi, Palawija dan Hortikultura
 - Pengembangan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian
 - Managemen Usaha Pengelolaan Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Pembangunan Sarana Prasarana, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan
 - Penguatan Kelembagaan, Kompetensi SDM dan Aksesibilitas Permodalan Usaha Perkebunan
 - Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Perkebunan
 - Pengembangan Kawasan Florikultura
 - Pengembangan Kawasan Sayuran
 - Kajian Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (Bantuan Provinsi 2017)
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- Intensifikasi, Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan
 - Perlindungan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Pengelolaan Gangguan Usaha dan Kebakaran pada Perkebunan
 - Pengelolaan Data Statistik Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Secara hirarki, rumusan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal yang digali dari berbagai potensi dan masalah spesifik lokal. Dengan demikian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan, walaupun bersifat otonom, namun masih bersifat komplementer, suplementer, dan integratif.

Atas dasar konsepsi dimaksud maka penetapan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2017 merupakan hasil perpaduan antara kebijakan pembangunan nasional, propinsi dan kebijakan spesifik lokal Kabupaten Sukabumi.

Rincian mengenai rencana kerja tersebut yang mencakup sasaran strategis, program, indikator kinerja dan target Dinas Pertanian Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terciptanya Kesempatan Kerja di Sektor Agribisnis	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan : a. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian b. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perkebunan c. Pengembangan dan Penguatan Permodalan Kelompok Pertanian dan Perkebunan d. Berkembangnya Sentra Komoditas Perkebunan : - Sentra Komoditas Karet - Sentra Komoditas Teh - Sentra Komoditas Kelapa - Sentra Komoditas Cengkeh e. Berkembangnya Sentra Komoditas Hortikultura : - Sentra Komoditas Cabe	200 Orang 117.000 Orang 30 Kelompok 1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 44 Desa

			<ul style="list-style-type: none"> - Sentra Komoditas Bawang Merah - Sentra Manggis - Sentra Komoditas Pepaya - Sentra Komoditas Pisang - Sentra Komoditas Jambu Kristal - Sentra Komoditas Bunga dan Daun Potong - Sentra Komoditas Biofarmaka 	<p>10 Desa</p> <p>17 Desa</p> <p>17 Desa</p> <p>14 Desa</p> <p>7 Desa</p> <p>16 Desa</p> <p>8 Desa</p>
			<p>f. Produk Olahan Hasil Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Olahan Padi - Hasil Olahan Palawija - Hasil Olahan Hortikultura 	<p>1 Jenis</p> <p>2 Jenis</p> <p>2 Jenis</p>
			<p>g. Pengembangan, Pemasaran dan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian - Pemasaran dan Promosi Hasil Perkebunan 	<p>5 Kali</p> <p>5 Kali</p>
2.	Meningkatnya Produksi Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<p>Meningkatnya Produksi hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi Pangan pada Perkebunan Besar b. Jumlah Produksi Padi c. Jumlah Padi Jagung d. Jumlah Produksi Kedelai e. Jumlah Produksi Ubi Kayu f. Jumlah Produksi Cabe g. Jumlah Produksi Tomat h. Jumlah Produksi Bawang Merah i. Optimalisasi Lahan j. Cetak Lahan Sawah/Perluasan Areal Sawah k. Pengembangan Insfrastuktur Pertanian l. Alat Pasca Panen dan Pasca Panen m. Alat Mesin Pertanian 	<p>1.400 Ton</p> <p>894.741 Ton</p> <p>36.000 Ton</p> <p>5.000 Ton</p> <p>155.000 Ton</p> <p>28.000 Ton</p> <p>25.133 Ton</p> <p>411 Ton</p> <p>500 Ha</p> <p>50 Ha</p> <p>4.000 Ha</p> <p>120 Unit</p>

			(Alsintan) Pertanian	440 Unit
3.	Meningkatkan Produksi Pertanian Non Pangan	Program Peningatan Produksi Pertanian	a. Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat : - Jumlah Produksi Karet - Jumlah Produksi Teh - Jumlah Produksi Kelapa - Jumlah Produksi Cengkeh - Jumlah Produksi Kopi - Jumlah Produksi Aren - Jumlah Produksi Pala - Jumlah Produksi Kakao b. Jumlah Produksi Perkebunan Besar : - Jumlah Produksi Karet - Jumlah Produksi Teh - Jumlah Produksi Kakao - Jumlah Produksi Kelapa Sawit - Jumlah Produksi Cengkeh	1.148 Ton 2.058 Ton 45.900 Ton 1.251 Ton 122 Ton 2.943 Ton 362 Ton 70 Ton 6.839 Ton 4.358 Ton 121 Ton 4.660 Ton 111 Ton

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanian

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 adalah sebagai acuan dalam menyusun pembangunan pertanian selama 1 (Satu) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian yaitu tersusunnya sasaran strategis, program dan kegiatan selama 1 (Satu) tahun.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian

Program di Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Produksi Pertanian dengan tujuan untuk Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian. Adapun Kegiatan untuk setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Prioritas Kegiatan pada program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah
- Peningkatan Produksi Padi
 - Optimalisasi Balai Benih Induk Padi sawah
 - Peningkatan Produksi melalui Prasarana dan Sarana Pertanian
 - Optimalisasi Kebun Dinas
 - WISMP II
 - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Kemitraan Usaha melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - DAK Reguler Bidang Pertanian (DAK Reguler 2017)
 - DAK Reguler Bidang Pertanian (Pendamping)
 - WISMP (Loan)
- b. Prioritas Kegiatan pada program Peningkatan Kesejahteraan Petani adalah :
- Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olahan Padi, Palawija dan Hortikultura
 - Pengembangan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian
 - Managemen Usaha Pengelolaan Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Pembangunan Sarana Prasarana, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan
 - Penguatan Kelembagaan, Kompetensi SDM dan Aksesibilitas Permodalan Usaha Perkebunan
 - Peningkatan Pemasaran Hasil Komoditas Perkebunan
 - Pengembangan Kawasan Florikultura
 - Pengembangan Kawasan Sayuran
 - Kajian Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan (Bantuan Provinsi 2017)
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian
- Intensifikasi, Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan
 - Perlindungan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Pengelolaan Gangguan Usaha dan Kebakaran pada Perkebunan
 - Pengelolaan Data Statistik Perkebunan (DBH Pajak Rokok 2017)
 - Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar

BAB IV

VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Pembangunan

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, rencana pembangunan daerah memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya wilayah perdesaan maupun pelosok-pelosok di Kabupaten Sukabumi yang masih cukup sulit dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh pemerintah daerah bagi peningkatan kualitas aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi pada periode ini.

Selain itu, keseimbangan pembangunan daerah baik dari segi sosial budaya, perekonomian, hingga lingkungan hidup juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam rangkaian pembangunan Kabupaten Sukabumi. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pembangunan Kabupaten Sukabumi diarahkan pada model pembangunan horizontal dimana pelaksanaan pembangunan di setiap bidang pembangunan akan memiliki porsi yang proporsional dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Diharapkan, akan terealisasi suatu keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta perwujudan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan

Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi sejahtera dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Gambar Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi



1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius

Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang direncanakan dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial, termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, hingga budaya daerah.

Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen visi pembangunan **Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius** pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

2. Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi

diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (*empowerment*). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk mengoptimalkannya dilakukan dengan *information sharing* agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pemberdayaan dapat membantu pencapaian ke empat misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu kemandirian ekonomi (misi 1), sumber daya manusia yang berdaya saing (misi 2), tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (misi 3) dalam hal ini berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan optimalisasi pelayanan dasar (misi 4).

4.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;**
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;**
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan**
- 4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.**

Penjelasan masing-masing dari misi di atas dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral

dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumber daya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa pengembangan pendidikan secara merata di Kabupaten Sukabumi baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan informal di luar sekolah. Namun, sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia berakhlak mulia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan agama penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk karakter masyarakat Kabupaten Sukabumi yang selaras dengan perwujudan pembangunan daerah.

Dengan demikian rencana pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi bersifat komprehensif yang telah mempertimbangkan baik aspek jasmani (sandang, pangan

dan perumahan) maupun aspek rohani (pendidikan mental dan spiritual) sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, lingkungan sosial maupun kultural daerah.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip dasar *good governance*. *Good Governance*. Dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan semangat dan tekad yang kuat dari para aparatur negara. Fasilitas yang sudah disediakan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi secara utuh dan konsisten sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Setidaknya ada sembilan parameter keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu :

- 1) Tidak ada korupsi
- 2) Tidak ada pelanggaran hukum
- 3) APBD baik
- 4) Semua program pemerintah daerah berjalan dengan baik
- 5) Perijinan cepat dan mudah serta tidak ada overlap
- 6) Komunikasi dengan publik berjalan baik
- 7) Penggunaan waktu efektif dan produktif
- 8) Adanya *reward* dan *punishment* terhadap kinerja aparat pemerintah, dan
- 9) Hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping

itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.

4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Sukabumi dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja ‘*impact*’ yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian;
2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan;
3. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta melindungi hak-hak pekerja
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi local;
7. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;
8. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
9. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
10. Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Kepada Masyarakat;
11. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing;
12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian.

Berdasarkan tujuan pembangunan diatas , yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian adalah tujuan pertama yaitu :

Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mewujudkan ketahanan pangan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah, perlu adanya suatu upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui pengembangan agribisnis yang merupakan salah satu alternatif pengembangan nilai tambah industri pengolahan dan sektor pertanian serta memperkuat sistem lembaga keuangan bagi usaha tani. Sebagai daerah yang memiliki berbagai produk unggulan pertanian, Kabupaten Sukabumi layak untuk mengembangkan dan memberdayakan setiap subsektor pertanian yang kompeten untuk menjadi basis peningkatan perekonomian masyarakat utamanya petani.

Guna meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian, maka sasaran pembangunan Dinas Pertanian yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pertanian.
- b. Meningkatnya Produksi Pangan.
- c. Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian
- d. Meningkatnya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
- e. Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian
- f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi local
- g. Meningkatnya diversifikasi olahan hasil pertanian
- h. Meningkatkan Produksi Pertanian Non Pangan

Dalam melihat keterkaitan dan hierarki visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi periode pembangunan 2016-2021 yang berkaitan dengan Tupoksi dari Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 Bagi Dinas Pertanian

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan Mandiri			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Misi 1 Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, pariwisata, dan industri berwawasan lingkungan	Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis, lembaga keuangan pertanian	Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pertanian	Meningkatnya tenaga kerja sektor pertanian - Pertanian Petani yang baru bergabung di kelompok tani
		Meningkatnya Produksi Pangan	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian, perkebunan dan peternakan Jumlah produksi padi Jumlah produksi jagung Jumlah produksi kedelai Jumlah produksi ubi kayu Jumlah produksi cabe Jumlah produksi tomat Jumlah produksi bawang merah Jumlah produksi karet, teh, kelapa, cengkeh, kopi, aren pala kakao dan kelapa sawit Perluasan Areal Lahan Kering Optimasi Lahan Cetak lahan sawah/Perluasan Areal Sawah

			Pengembangan Infrastruktur Pertanian		
			Alat Pasca Panen		
			ALSINTAN PERTANIAN		
			Pengembangan dan Penguatan Permodalan Kelompok pertanian		
		Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			Berkembangnya sentra komoditas hortikultura :
					Cabe
					Bawang Merah
					Manggis
					Pepaya
					Pisang
					Jambu Kristal
					Bunga dan Daun Potong
					Biofarmaka
					Produk olahan hasil pertanian
		Padi			
Palawija					
Hortikultura					
Meningkatnya produksi pertanian non pangan			Intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi komoditas pertanian non pangan		

Dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal terutama Melalui Bidang Agribisnis Yang Berwawasan Lingkungan maka strategi yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 1

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis, lembaga keuangan pertanian	Terciptanya kesempatan kerja di sektor agribisnis	Meningkatkan kesempatan kerja di bidang pengolahan produksi pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan pengembangan usaha kelompok tani
		Meningkatnya produksi pangan	Meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
		Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian	Mengembangkan Sentra Agribisnis pertanian

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatkan Produksi Pertanian Non Pangan	Meningkatkan jumlah produksi pertanian non pangan

Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) enam tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 terdapat enam prioritas pembangunan yaitu:

1. Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Agribisnis;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha;
4. Peningkatkan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda Dan Olahraga;
6. Peningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat.

Berdasarkan prioritas diatas yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pertanian dijelaskan dengan uraian berikut :

1. Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis

Dalam kehidupan manusia terdapat tiga utama kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan untuk dapat beraktifitas. Kabupaten Sukabumi merupakan daratan dengan aneka sumber daya yang berpotensi tinggi, lahan - lahan potensial dalam

bidang pertanian sebagai bahan pokok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menyikapi isu/permasalahan di masa depan tentang kurangnya ketersediaan bahan pokok pangan, Kabupaten Sukabumi harus mulai mewaspadaikan dan menyalasi ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang krusial karena hal ini akan memberi dampak pada sektor-sektor yang sedang berjalan.

Ketahanan pangan menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan adanya hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, yang menyatakan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Peran aktif pemerintah dan masyarakat khususnya Kabupaten Sukabumi sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan secara sinergi. Sehingga dengan memiliki ketahanan pangan, daerah akan memiliki ketersediaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dimaksudkan untuk penggalian potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam/agraria secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam pengontrolan dan pengelolaan pemerintah berdasarkan asas kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal hendaknya memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu upaya dalam menyalasi strategi ini yakni dengan mengupayakan pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal daerah. Melalui pengembangan ekonomi lokal daerah, maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertanggung perekonomian daerah.

Pengembangan agribisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai industri berbasis sumber daya. Agribisnis berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja (khususnya pada Kabupaten Sukabumi) yang mempunyai potensi dalam mengkolaborasikan sentra pertanian dengan sentra bisnis. Pengembangan agribisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek.

3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha

Pekerjaan merupakan aktifitas manusia yang menghasilkan sesuatu baik barang ataupun berupa uang. Barang dan uang yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik apabila manusia mempunyai pekerjaan, agar dihasilkan sesuatu sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Diperlukan campur tangan dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Kondisi daerah yang kondusif merupakan prasyarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. Selain kondisi daerah yang memadai, SDM daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing manusia di Kabupaten Sukabumi dan peningkatan infrastruktur daerah merupakan modal dasar dalam upaya penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM yang berkualitas, sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan dan perluasan kesempatan kerja merupakan *impact* dari peningkatan SDM dan infrastruktur.

4. Peningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan kata yang cukup kompleks, karena ia mengandung beberapa unsur untuk dapat mencapai sejahtera. Sejahtera dapat dikatakan sebagai “bahagia dan berkecukupan dalam segala hal”, dan segala aspek kehidupan manusia berpengaruh dalam mencapai sejahtera. Peningkatan kemampuan daerah dalam

menciptakan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan perlu melakukan efektifitas kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dengan adanya pengefektifan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, diharapkan terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, ketepatan sasaran penerima bantuan dan perlindungan sosial perlu diperhatikan agar pengentasan kemiskinan berdampak efektif dan efisien dalam mengurangi beban masyarakat.

Upaya memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin memiliki kesempatan keluar dari garis kemiskinan dan terus menjaga perekonomiannya agar tidak kembali ke dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini sangat diperlukan karena upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memiliki dampak panjang dalam kestabilan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan melakukan strategi pemberdayaan, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan segala potensi SDM maupun SDA di masing-masing wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu melakukan upaya berupa meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar dapat mendayagunakan segala potensi dengan tepat untuk pencapaian pembangunan daerah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta peningkatan kualitas udara dan perairan perlu dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan berkualitas perlu didukung oleh upaya penegakan hukum lingkungan secara efektif dan adil sehingga keseimbangan antara integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Sinergi antara peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian. Perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko berupa dampak perubahan ekosistem baik secara negatif maupun positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Secara nyata,

hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan Pembangunan Pertanian selaras dengan arah kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi periode 2016 sampai 2021. Pada Tahun pertama (2016) arah kebijakannya adalah “Mewujudkan Pembangunan Kab Sukabumi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas, kemandirian dan daya saing”, Tahun kedua (2017) adalah Peningkatan Kualitas Daya saing SDM dengan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai, Tahun Ketiga (2018) adalah Penguatan Perekonomian lokal yang kondusif dengan didukung oleh Pemerataan Pembangunan Wilayah, Tahun Keempat (2019) adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui penurunan kesenjangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tahun Kelima (2020) adalah Penguatan reformasi birokrasi pada seluruh aspek pembangunan dan pada tahun terakhir (2021) arah kebijakannya adalah Pemantapan Kemandirian masyarakat pada aspek sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian tahun 2017 di Kabupaten Sukabumi tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah maupun partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan berbagai rencana kegiatan pada tahun 2017.

Sukabumi, Januari 2017

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,



Ir. Hj. DEDAH HERLINA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19630711 198809 2 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)						Keterangan			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF							
														P3K	SEKTORAL								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.	Wajib	Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		Kebijakan Peningkatan Daya Beli Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian(Ton) :						0	0	73.800.000	15.000.000	82.670.000	0	171.470.000	180.900.000	Dinas Pertanian	
				1. Peningkatan Produksi Padi			47 Kec.			a. Gogo Rancah Cultivator Benih Unggul Pupuk Organik	- - 18 unit - 180 Ha - 180 Ha		Peningkatan Luas panen	10%	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.500.000	
				2. Peningkatan Produksi Palawija			Pabuaran, Waluran, Jampangkulon, Jampangtengah, Surade			- Meningkatnya areal yang menerapkan paket teknologi budidaya jagude	200 Ha	Meningkatnya produktivitas kacang tanah di lokasi kegiatan	2 Ku/Ha	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.500.000		
							Pabuaran, Jampangtengah, Lengkong, Jampangkulon, Cimanggung			- Meningkatnya areal yang menerapkan paket teknologi budidaya ubikayu	100 Ha	Meningkatnya produktivitas ubikayu di lokasi kegiatan	20 Ku/Ha										
							Tegalbuleud			- Meningkatnya areal yang menerapkan paket teknologi budidaya kedelai, seluas 50 Ha	50 Ha	Meningkatnya produktivitas kacang hijau di lokasi kegiatan	2 Ku/Ha										
							Kalapanunggal, waluran, ciambar			- Terlaksananya penangkaran benih ubikayu	15 Ha	Tersedianya benih ubikayu bersertifikat	3 juta stek										

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)						Keterangan				
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF								
														P3K	SEKTORAL									
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										- Terlaksananya diseminasi pengembangan produksi pajale	3 kali		Adanya kesamaan persepsi stake holders dalam pengembangan produksi palawija	200 orang										
										7. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan produksi pajale	3 kali		Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas pertanian dan petani dalam pengelolaan produksi palawija	80%										
				3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian			Sukaraja, Sukalarang, gegeberbitung, caringin, kadudampit, Simpenan			- Hortikultura Benih Unggul (Cabe, Tomat dan Bawang merah) - Pupuk - SLGAP dan SL GHP	100 Ha	Peningkatan Produksi : - Cabe Tomat Bawang merah	10%	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000	6.000.000			
				4. Optimalisasi Balai benih Induk Padi Sawah			Gununggruh, Cicurug			Tersedianya Benih Unggul Bersertifikat	50 Ton	Peningkatan Penggunaan Benih/Bibit unggul	15%	0	0	300.000	0	0	0	300.000	400.000			
				5. Pengamanan produksi Padi, Palawija dan Hortikultura			Wilayah Sukabumi, Cibadak, Cicurug, Palabuhanratu, Jampang tengah, Jampangkulon dan Sagaranten			- Spot Stop Padi, jagung, kedede dan ubikayu dan Hortikultura Sarana pengendalian OPT	- 7 Lokasi - 10 Jenis	Menurunnya serangan OPT terhadap pertanaman padi, palawija dan hortikultura	10%	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.100.000			
				6. Pengembangan Infrastruktur Pertanian			Wilayah Sukabumi			Jaringan Irigasi	200 Unit		200 Unit	0	0	20.000.000	10.000.000	0	0	30.000.000	31.000.000			
										Jalan Pertanian	20 Km	Peningkatan Indeks Peningkatan Ketersediaan Air	20 Km											
										Pipanisasi/Perpompaan	50 Unit		50 Unit											
										Embung	20 Unit		20 Unit											
										Dam Parit	150 Unit		150 Unit											
										Gudang	2 Unit	Gudang penyimpanan alsintan	2 Unit											
				7. Peningkatan Produksi melalui Prasarana dan Sarana Pertanian			47 Kecamatan			RDKK Pupuk	3.314 kel	Penggunaan Pupuk Bersubsidi	1 Tahun	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	23.000.000			
										RTTG	8 wilayah	Pola Tanam	1 Tahun											

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)						Keterangan			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF							
														P3K	SEKTORAL								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
										Alsintan	30 unit	Percepatan Tanam	IP 200 - IP 300										
										Jaringan Air/irigasi	122 Unit	Peningkatan Indeks Peningkatan Produktivitas	122 Unit										
										Pengembangan Perpipaan/Perpompaan	30 Unit	Peningkatan Indeks Peningkatan Ketersediaan Air	30 Unit										
										Pengembangan Dam Parit/ Embung	25 Unit	Penambahan Areal tanam	25 Unit										
										Jalan Pertanian	20 Km	Peningkatan Indeks Peningkatan Produktivitas	20 Km										
										Fasilitasi Komisi Pupuk dan Pestisida	1 Tahun	Kesesuaian penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK	1 Tahun										
										Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi	47 Kec	Penggunaan Pupuk Bersubsidi	47 Kec										
				8. Optimalisasi Kebun Dinas			Baros,Cikakak, gegerbitung.jp tengah.jp kulon, ciracap			Terlaksananya pengelolaan kebun dinas	6 Lokasi	Meningkatnya Produksi Hasil Kebun Dinas	20%	0	0	500.000	0	0	0	500.000	600.000		
				9. WISMP II			Sukaraja, Gegerbitung, Nagrak, warungkiara, Cikakak, Waluran, Surade, Curugkembar			Pembinaan P3A/GP3A Dana Investasi Agribisnis(DIA) Legalisasi P3A/GP3A	10 DI 14 kel P3A/GP3A 30 Kelompok	Meningkatnya peran P3A/GP3A	80%	0	0	500.000	0	0	0	500.000	600.000		
				10. WISMP Loan						Fasilitas peralatan pertanian	4 Unit	Memingkatnya indeks pertanaman	20%			500.000	0	0	0	500.000	600.000		
				11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			47 Kecamatan			- Media Sosialisasi Penerapan Perda LP2B - Insentip LP2B berupa benih dan pupuk Insentif LP2B berupa sertifikasi dan keringanan PBB - Delinisasi dan pemetaan sawah LP2B	5 jenis 20.000 Ha 20.000 paket 10.000 Ha	Menurunnya alih fungsi Lahan sawah	80%	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	10.000.000	11.000.000		

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)						Keterangan					
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan		
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF									
														P3K	SEKTORAL										
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				12. DAK Reguler Bidang Pertanian			47 Kecamatan			Irigasi Air Tanah : - Irigasi tanah dangkal	52 unit	Meningkatnya indeks pertanaman	20%	0	0	0	0	22.000.000	0	22.000.000	23.000.000				
				13. DAK Reguler Bidang Pertanian (Pendampingan)			47 Kecamatan			Monitoring dan Evaluasi	47 Kec	Meningkatnya indeks pertanaman	20%	0	0	250.000	0	0	250.000	300.000					
				14. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan						a. Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi (Ton)	2,16	Meningkatnya Produksi Kacang dan Umbi	2,16 Ton	0	0	0	0	30.670.000	0	30.670.000	31.000.000				
										b. Peningkatan Produksi Tan. Serealisa (Ton)	1,15	Meningkatnya produksi serealisa	1,15 Ton												
										c. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan : - Pembinaan Kelompok	30 Kelompok	Meningkatnya pengetahuan kelompok dalam pengolahan dan pemasaran	30 Kelompok												
										d. Fasilitas dan Pasca Panen Tanaman Pangan : - Conseller - Combine	20 Unit 10 Unit	Adanya Fasilitas alat pasca panen tanaman pangan	20 Unit 10 Unit												
				15. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian						Rehabilitasi Jaringan Irigasi	150 Unit	Peningkatan Indeks Peningkatan Produktivitas	150 Unit	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	31.000.000				
										Pengembangan Perpipaan/Perpompaan	50 Unit	Peningkatan Indeks Peningkatan Ketersediaan Air	50 Unit												
										Pengembangan Dam Parit/ Embung	20 Unit	Peningkatan Indeks Peningkatan Ketersediaan Air	20 Unit												
										Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	47 Kec	Tersalurnya pupuk bersubsidi dengan tepat	47 Kec												
										Cetak Sawah	47 Kec	Penambahan areal sawah	47 Kec												
				16. Kemitraan Usaha Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan			57 Kebun			Produksi pangan pada lahan perkebunan	1.400	Jumlah Produksi Pangan pada Perkebunan (Ton)	1.400	0	0	250.000	0	0	250.000	300.000					
2.	Pilihan	Pertanian												0	0	14.950.000	1.685.000	30.150.000	0	46.785.000	50.550.000				

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)						Keterangan			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF							
														P3K	SEKTORAL								
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pilihan	Pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Kebijakan Peningkatan Daya Beli Dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Jumlah tenaga Kerja Sektor Pertanian :								14.950.000	1.685.000	30.150.000	0	46.785.000	50.550.000		
								- Tenaga Kerja Sektor Pertanian	200 orang														
								Pengembangan dan Penguataan Permodalan Kelompok pertanian	30 kelompok														
								Berkembangnya Sentra Komoditas Pertanian															
								- Sentra Komoditas Cabe	44 Desa														
								- Sentra Komoditas Bawang merah	10 Desa														
								- Sentra Komoditas Manggis	17 Desa														
								- Sentra Komoditas Pepaya	17 Desa														
								- Sentra Komoditas Pisang	14 Desa														
								- Sentra Komoditas Jambu Kristal	7 Desa														
								- Sentra Komoditas Bunga dan Daun Potong (Florikultura)	16 Desa														
								- Sentra Komoditas Biofarmaka	8 Desa														
								Produk Olahan Hasil pertanian															
								- Hasil Olahan Padi	1 jenis														
								- Hasil Olahan Palawija	2 jenis														
								- Hasil Olahan Hortikultura	2 jenis														
								Penyerapan Tenaga Kinerja sektor Perkebunan	117.000 Orang														
								Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian	5 Kali														

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)						Keterangan				
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF								
														P3K	SEKTORAL									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
								Pemasaran dan Promosi Hasil Perkebunan	5 Kali															
				1.Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olahan Padi, Palawija dan Hortikultura			Ds Langensari dan Ds Wanasari Kec Sukabumi, Ds Pasir datar Kec Caringin, Ds Cipetir Kec.Kadudampit, Ds Wangun jaya Ciambar, Ds Gngendut Klp nunggal, Cibadak, Sukabumi, Ciemas	Fasilitas Separator	10 Unit	Meningkatnya Mutu beras	20%	0	0	2.000.000	0	23.000.000	0	25.000.000	26.000.000					
								Alat Pasca Panen: a. Combine Harvester b. Terpal c. Power Thresher d. Alat pengukur kadar air	5 unit 500 unit 5 unit 10 unit	Menurunnya angka kehilangan hasil	8%													
								Alat Pengolahan Padi, Palawija dan Hortikultura	15 unit	Meningkatnya Mutu olahan hasil pertanian	25%													
				2.Pengembangan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian			47 kec	Adanya Fasilitas Pameran dan promosi Produk Pertanian	19 kali	Meningkatnya peluang pasar domestik bagi pelaku usaha pertanian	30%	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.500.000					
								Outlet show window	1 lokasi															
								Temu kemitraan	1 kali															
				3.Pengembangan dan Penguatan Permodalan Kelompok Pertanian			47 kec	Adanya fasilitas permodalan pertanian	100 poktan	Meningkatnya modal usaha	100 poktan	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.500.000					
				4. Pengembangan Kawasan Buah-Buahan			Wil. Sukabumi	Adanya Kawasan Produk Unggulan Pisang, Manggis, Sirsak ratu dan Durian	55 Desa	Adanya Kawasan Produk Unggulan Pisang, Manggis, Sirsak ratu dan Durian	55 Desa	0	0	2.450.000	0	0	0	2.450.000	2.600.000					
				5. Pengembangan Kawasan Sayuran			Wil. Sukabumi	Adanya Kawasan Produk Unggulan Cabe, Tomat dan Bawang merah	54 Desa	Adanya Kawasan Produk Unggulan Cabe, Tomat dan Bawang merah	54 Desa	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	3.100.000					
				6. Pengembangan Kawasan Biofarmaka			Wil. Sukabumi	Adanya Kawasan Produk Unggulan Temu Lawak dan Jahe	8 Lokasi	Adanya Kawasan Produk Unggulan Temu Lawak dan Jahe	8 Lokasi	0	0	250.000	0	0	0	250.000	300.000					

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)						Keterangan			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF							
														P3K	SEKTORAL								
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				7. Pengembangan Kawasan Florikultura			Ds sudajaya girang, Sukabumi, Ds Langensar, Ds. Sukaraja, Ds. Cidahu Kec. Cidahu			- Green house - Pompanisasi - Jalan pertanian	42 unit 1 unit 500 m	Adanya Kawasan Bunga dan Daun Potong (Florikultura)	4 Desa	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.100.000		
				8. Pengembangan Pisang di Wilayah Jabar Selatan			Wil. Sukabumi			Penanaman Pisang di Wil. Sukabumi	100 Ha	Adanya kawasan pisang unggulan di Kab. Sukabumi	100 Ha	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.200.000		
				9. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan			Wil. Sukabumi			a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	7 Lokasi	Adanya Kawasan Produk Unggulan Pisang, Manggis, Sirsak ratu dan Durian	7 Lokasi	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.200.000		
					b. Peningkatan Produksi ,Produktivitas dan Mutu Produk Fonkultur Berkelanjutan	8 Lokasi		Adanya Kawasan Produk Unggulan Krisan, Sedap Malam, Dracaena dan Policias	8 Lokasi	0	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	3.700.000						
					c. Peningkatan Produksi ,Produktivitas dan Mutu Produk Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan	9 Lokasi		Adanya Kawasan Produk Unggulan Cabe, Bawang merah, Kentang dan Tan. Temu Lawak, Kapulaga	9 Lokasi	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.200.000						
				10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan			Ds. Ciengang Kec. Gegerbitung			Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Pasca Panen Perkebunan	4 Unit	Jumlah Sarana Prasarana Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan	4 Unit	0	0	300.000	0	250.000	0	550.000	800.000		
				11. Penguatan Kelembagaan, Kompetensi SDM dan Aksesibilitas Permodalan Usaha Perkebunan			Wilayah Sukabumi			Penguatan Kelembagaan dan Permodalan Kelompok	7 Kelompok	Jumlah Kelompok yang Dibina dan Difasilitasi Permodalannya	7 Kelompok	0	0	350.000	0	0	0	350.000	400.000		
				12. Pembangunan Insfaktur Perkebunan																			

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)							Keterangan		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF							
														P3K	SEKTORAL								
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				- Cengkeh			Kec. Palabuhan dan Cikakak			Jumlah Produksi Perkebunan Cengkeh Rakyat	1,264 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	1,264 Ton	0	0	200.000	0	300.000	0	500.000	750.000		
				- Kopi						Jumlah Produksi Perkebunan Kopi Rakyat	122 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	122 Ton	0	0	100.000	0	0	0	100.000	200.000		
				- Aren						Jumlah Produksi Perkebunan Aren Rakyat	2,943 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	2,943 Ton	0	0	100.000	0	0	0	100.000	200.000		
				- Pala						Jumlah Produksi Perkebunan Pala Rakyat	362 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	362 Ton	0	0	200.000	0	300.000	0	500.000	600.000		
				Kakao						Jumlah Produksi Perkebunan Kakao Rakyat	70 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	70 Ton	0	0	125.000	0	0	0	125.000	200.000		
				2. Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (Ton)																			
				- Karet			Wilayah Sukabumi			Produksi Karet	6,839 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Besar	6,839 Ton	0	0	50.000	0	0	0	50.000	70.000		
				- Teh			Wilayah Sukabumi			Produksi Teh	4,358 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Besar	4,358 Ton	0	0	50.000	0	0	0	50.000	70.000		
				- Kakao			Wilayah Sukabumi			Produksi Kakao	121 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Besar	121 Ton	0	0	20.000	0	0	0	20.000	50.000		
				- Kelapa Sawit			Wilayah Sukabumi			Produksi Kelapa Sawit	4,660 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Besar	4,660 Ton	0	0	30.000	0	0	0	30.000	60.000		
				- Cengkeh			Wilayah Sukabumi			Produksi Cengkeh	111 Ton	Meningkatnya Jumlah Produksi Perkebunan Besar	111 Ton	0	0	20.000	0	0	0	20.000	50.000		
				3. Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan			Kec. Cikakak dan Cisolak			Bibit Kelapa dan Cengkeh	2 Komoditas	Peningkatan Penggunaan Bibit Kelapa dan Cengkeh yang Berkualitas	2 Komoditas	0	0	250.000	0	0	0	250.000	300.000		

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)						Keterangan				
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF								
														P3K	SEKTORAL									
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				4. Perlindungan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan			Wilayah Sukabumi			Pengendalian dan Perlindungan OPT Perkebunan	5 Kali	Meningkatnya Perlindungan dan Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman perkebunan	5 Kali	0	0	150.000	0	0	0	150.000	200.000			
				5. Pengendalian Gangguan Usaha dan Kebakaran pada Perkebunan			Kec. Cikakak			Pengendalian Gangguan Usaha dan Kebakaran	5 Kali	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Usaha dan Kebakaran pada Lahan Perkebunan	5 Kali	0	0	150.000	0	0	0	150.000	200.000			
				6. Pengolahan Data Statistik Perkebunan			Kab. Sukabumi			Data Statistik Perkebunan	2 Dok	Tersedianya Buku Statistik Perkebunan	2 Dok	0	0	350.000	0	0	0	350.000	400.000			
														0	0	670.000	0	0	0	670.000	800.000			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kantor Dinas Pertanian			Dokumen Perencanaan dengan data pendukung	12 Bulan	Adanya alur perencanaan pembangunan pertanian	12 Bulan	0	0	200.000	0	0	0	200.000	250.000			
				2. Monitoring dan Evaluasi			Kab. Sukabumi				Dokumen monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pertanian	1 Dok	Bahan Kebijakan perencanaan kegiatan	1 Dok	0	0	120.000	0	0	0	120.000	150.000		
				3. Perencanaan Pembangunan Pertanian			Kab. Sukabumi				Dokumen Perencanaan pertanian	7 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	0	0	350.000	0	0	0	350.000	400.000		
														0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	2.450.000			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran	1 Tahun	Pelayanan Terhadap Masyarakat	1 Tahun	0	0	700.000	0	0	0	700.000	650.000			
				2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis			Kantor Dinas Pertanian				Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD	1 Tahun	Pelayanan Terhadap Masyarakat	1 Tahun	0	0	750.000	0	0	0	750.000	800.000		
				3. Pelayanan Administrasi Aset			Kantor Dinas Pertanian				Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Aset	1 Tahun	Pelayanan Terhadap Masyarakat	1 Tahun	0	0	500.000	0	0	0	500.000	700.000		
				4. Pelayanan Administrasi Kepegawaian			Kantor Dinas Pertanian				Tersedianya Fasilitas Pendukung Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	Pelayanan Terhadap Masyarakat	1 Tahun	0	0	250.000	0	0	0	250.000	300.000		
														0	0	9.150.000	0	0	0	9.150.000	11.920.000			

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)							Keterangan		
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF							
														P3K	SEKTORAL								
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Fasilitas Kantor Berupa Kendaraan Roda Empat dan Dua	10 Buah	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	500.000	0	0	0	500.000	600.000		
				2. Pengadaan Perangkat Komputer			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Fasilitas Kerja Pegawai Berupa Note Book/Komputer	10 unit	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 90%	10%	0	0	200.000	0	0	0	200.000	250.000		
				3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional Berupa Bensin/Solar dan Jasa Service	1 Tahun	Pelayanan Terhadap Masyarakat	1 Tahun	0	0	600.000	0	0	0	600.000	700.000		
				4. Pembangunan Pagar Kantor			Kebun Dinas Cimaja			Pembangunan Pagar Kebun Dinas	1 Unit	Meningkatnya Keamanan di Kebun Dinas dari 90% menjadi 95%	5%	0	0	300.000	0	0	0	300.000	350.000		
				5. Pengadaan Peralatan Kantor			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Fasilitas Peralatan Kantor Dinas Pertanian	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	250.000	0	0	0	250.000	300.000		
				6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Fasilitas Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pertanian	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	200.000	0	0	0	200.000	250.000		
				7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Fasilitas Listrik Kantor Dinas Pertanian	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	300.000	0	0	0	300.000	350.000		
				8. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Kantor Dinas Pertanian			Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor Dinas Pertanian	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	500.000	0	0	0	500.000	600.000		
				9. Pengadaan Perlengkapan Kantor			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Kantor Dinas Pertanian	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	400.000	0	0	0	400.000	450.000		
				10. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kantor Dinas Pertanian			Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor Dinas Pertanian	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	300.000	0	0	0	300.000	350.000		
				11. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor			Kantor Dinas Pertanian			Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas Pertanian	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	500.000	0	0	0	500.000	600.000		

No	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu x (Rp. 1000)						Keterangan			
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBD Kab./Kota			APBD Provinsi	APBN / PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Prakiraan Maju (Ribuan)	OPD Pengusul	Jenis Kegiatan
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	PIK		PAGU INDIKATIF							
														P3K	SEKTORAL								
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				12. Pemeliharaan Rutin /Berkala Instalasi Air			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Fasilitas Air Kantor Dinas Pertanian	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	100.000	0	0	0	100.000	120.000		
				13. Pembangunan Gedung Kantor			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Fasilitas Gedung Kantor Dinas Pertanian	1 Tahun	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	7.000.000		
														0	0	500.000	0	0	0	500.000	550.000		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Kantor Dinas Pertanian			Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	400 Buah	Meningkatnya Kinerja Pegawai dari 80% menjadi 95%	15%			500.000				500.000	550.000		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Apratur			Kantor Dinas Pertanian			Tertlaksananya Pengajian Rutin Pegawai Dinas Pertanian	1 Kali	Meningkatnya Kemampuan Kinerja dari 80% menjadi 85%	5%	0	0	100.000	0	0	0	100.000	120.000		
JUMLAH TOTAL														0	0	104.465.000	16.685.000	115.370.000	0	236.520.000	254.940.000		

Sukabumi, Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi



Ir. H. DEWI HERLINA, M.Si
NIP. 19630711 198809 2 001